BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian selatan dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Luas kabupaten trenggalek adalah 1.261,40 Km^2. Sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah sedangkan sisanya 1/3 bagian berupa tanah dataran rendah.[2]

Salah satu daerah yang menjalankan sistem otonomi daerah adalah Kabupaten Trenggalek, dan juga sebagai penyumbang yang turut berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional. Kabupaten Trenggalek masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga sekeresidenan yang meliputi Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk.

Hal ini dapat dilihat melalui besaran Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek masih sangat rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah disekitarnya. Sebagai gambaran Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 sebesar Rp. 267,18m terbilang paling rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Tulungagung, Kediri, Blitar, dan Nganjuk yang masing-masing sebesar Rp. 719,59m, Rp. 570,24m, Rp. 411,64m, dan Rp. 402,50m. Kondisi rendahnya Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek

[2] Kabupaten Trenggalek "Profil Kabupaten Trenggalek." Dalam jatim.bpk.go.id/, diakses pada 28 Oktober pukul 18.30 WIB.

dibandingkan Kabupaten tetangga tidak hanya terjadi pada tahun 2023 saja tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.[3]

Tingakat PAD Kabupaten Trenggalek yang masih rendah, mengakibatkan masih mengandalkan tranfer dari pusat untuk menutupi kekurangan belanja daerah. Dana tranfer dari Pemerintah Pusat dimaksimalkan sebagai salah satu dari sumber pendanaan oleh daerah. Bantuan dana dari pusat memberikan celah untuk daerah dalam menutup kekurangan pembiayaan, sehingga bantuan dana pusat ini sangat diharapkan untuk bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah.

Selain itu Kabupaten Trenggalek masih tergolong rendah dalam wajib pajak daerah pada jenis hotel dan restoran, serta penetapan tarif tinggi pada jenis pajak pariwisata dan hiburan yang mengakibatkan kurang tergalinya potensi pada jenis-jenis pajak tersebut, kurangnya fasilitas yang memadai untuk menopang optimalisasi kinerja retribusi dan juga kurangnya sumber daya ahli atau profesional dalam sektor pendapatan asli daerah. Hal ini menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah akan bantuan dari pemerintah pusat semakin dominan.

Antusiasme masyarakat terhadap kinerja pemerintahan sangat tinggi terutama pada bidang kinerja keuangannya, sebagaimana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemeberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan

[3] Jawa Timur Dalam Angka. 2023. Dalam jatim.bpk,go.id/, diakses pada 28 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB.

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keikhlasan suatu daerah dalam upaya untuk tata kelola suatu negara.

Anggraeni menyatakan bahawa kinerja keuangan merupakan cerminan suatau gambaran atau kondisi baik buruknya suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu[4]. Dalam hal ini kinerja keuangan pemerintahan dapat diukur dari beberapa aspek salah satunya laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mardiasmo, "suatu tujuan dilakukannya pengukuran kinerja untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintahan, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik".[5]

Dalam hal untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah wajib untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dengan demikian aspek pertanggung jawaban merupakan faktor penting atau kunci untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah, yang baik dalam tingakat pusat maupun lokal (daerah). Sehingga dari laporan pertanggung jawaban keuangan, dapat diketahui bagaimana keberhasilan suatu pemerintahan dalam mengelola keuangan negara ataupun daerah, melalui penerimaan atau pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan pertangung jawaban keuangan pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran,

[4] Anggraeni, Rizky Putri Khalifah and Tutik Siswanti, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pt. Xl Axiata Tbk Dan Pt. Indosat Tbk Dengan Current Ratio, Return On Equity, Dan Debt To Equity Ratio Periode 2017-2021," *JIMA Jurnal Ilmu Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 1 (2023), hal 1–14.

[5] Mardiasmo, M. B. A. *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.(2021).

dapat dilihat tingkat efektivitas dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan dan juga jumlah retribusi setiap tahunya.

Pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek yang mempunyai kewajiban dalam pelaporan upaya-upaya yang dilakukan, serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu. Untuk perwujutan dalam menilai sebuah akuntabilitas, transparansi, dan dalam pengambilan suatu keputusan baik bidang ekonomi, sosial ataupun dalam hal politik. Untuk itu pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan daerah sebegai pertanggung jawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Trenggalek menggunakannya untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, untuk menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2023 mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tuju kalinya. [6]

Namun menurut Mochamad Nur Arifin Bupati Kabupaten Trenggalek, masih banyak pekerjaan rumah atau tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Ada dua prioritas yang difokuskan yaitu penanggulangan bencana alam dan pemulihan ekonomi dengan perencanaan sebaik mungkin

[6] "Pemkab Trenggalek Kembali Raih Opini WTP Ke 7 Berturut-Turut Dari BPK-RI," Pemkab Trenggalek, dalam trenggalekkab.go.id, diakses pada 18 Desember 2023 pukul 09.40 WIB.

baik dari segi penganggaran dan evaluasi setelah pengerjaan. [7] Menurut Bastian, kinerja anggaran merupakan sebuah gambaran suatu pencapaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebuah organisasi.[8]

Tabel 1. 1
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 – 2023

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (M)
2019	285.134.071.594,78
2020	257.977.459.483,90
2021	233.490.679.200,57
2022	412.882.847.335,00
2023	267,177.163.229,08

Sumber : BEKEUDA Kabupaten Trenggalek

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perolehan pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek tidak stabil. Pada tahun 2019 Kabupaten Trenggalek menyentuh angka Rp. 299.160 m sebelum pandemi covid-19. Pada saat pandemi covid-19 berlangsung pada tahun 2020-2021 Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan pendapatan. Setelah pandemi pendapatan Kabupaten Trenggalek mengalami kemunduran pada tahun 2022 dengan nominal sebesar Rp. 248.233 m. Karena belum banyaknya pariwisata yang dibuka untuk umum. Hal ini dikarenakan penyumbang terbesar pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek dalam sektor pariwisata. Sedangkan pada tahun 2023 pendapatan

[7] "Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-Turut, Pemkab Trenggalek Komitmen Pulihkan Sektor Ekonomi," Liputan 6, 2023, dalam https://www.liputan6.com/news/read/5131125/raih-opini-wtp-7-kali-berturut-turut-pemkab-trenggalek-komitmen-pulihkan-sektor-ekonomi diakses pada 18 Desember pukul 10.12 WIB.

[8] Bastian, Ratna, Nadiatul Khoirul, and Muhammad Ridho, "Citra Ekonomi," *Jurnal Citra Ekonomi* 4, no. 1 (2021): 90–100.

asli daerah trenggalek mengalami peningkatan pesat sebesar Rp. 267.251 m hal ini dikarenakan pendapatan daerah sudah kembali normal, serta sektor pariwisata yang menjadi penunjang pendapatan daerah sudah kembali berjalan.

Keberadaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur kemampuan daerah untuk menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah serta menjadi sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Disisi lain PAD juga sebuah cermin kemadirian suatu daerah. Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah dapat melakukan peningkatan pada retribusi hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Sementara itu, keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah dapat diketahui berdasarkan tingkat efektivitas dan efisiensi suatu program. Tingkat efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan cara membadingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan untuk mengukur tingkat efektivitas dengan cara membandingkan hasil realisasi penerimaan (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Penelitian mengenai kinerja keuangan Kabupaten Trenggalek ini sudah dilakukan diantaranya (Rahayu, 2017), (Ekowati & Sumiati, 2016) , (Krisna dkk, 2023) periode yang digunakan peneliti tersebut yaitu 2010-2014, 2012-2015, dan 2018 dengan menggunakan metode kauntitatif deskriptif. Menggunakan rasio analisis yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efisiensi dan efentivitas, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan. Dari beberapa penelitian tersebut sepanjang tahun 2010-2018 Kabupaten Trenggalek dari rasio

ketergantungan masih tergolong tinggi, rasio efektivitas PAD sangat baik dan juga rasio efisiensi PAD tergolong efisien.

Menurut Abdul Halim, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja pemerinahan daerah dalam mengelola keuanganna adalah menggunakan analisis rasio keunagan terhadap APBD yang dilaksanakan dan ditetapkan.[9] Dalam penelitian ini, penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek menggunakan 3 rasio keuangan yaitu rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan raiso efisiensi PAD.

Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan tranfer dengan pendapatan asli. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/provinsi.[10]

Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan PAD dengan jumlah target (anggaran) PAD.[11] Rasio efisiensi PAD dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah biaya pemerolehan PAD dengan jumlag realisasi penerimaan PAD.[12]

Dengan demikian penelitian ini ingin melanjutkan terkait penilaian kinerja keuangan Kabupaten Trenggalek tahun 2019-2023 untuk melihat sejauh mana perkembangan dalam pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah

[9] Abdul Halim, Ratna dkk. "Citra Ekonomi.", hal 110-111

[10] Mahmudi, "*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*". Edisi Keempat, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2019), hal. 140

[11] Ibid 140

[12] Ibid 140

Kabupaten Trenggalek dinilai dari ketergantungan keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, serta efesiensi pendapatan asli daerah.

Selanjutnya, hasil analisis rasio tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023".**

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yaitu :

1. Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap Pemerintah Pusat/Provinsi masih dalam kategori tinggi.
2. Kemampuan dalam menggali pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek masih dalam kategori kurang.
3. Masih tingginya belanja rutin dibandingkan dengan belanja modal daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli?

3. Bagaimana kinerja keuangan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Keguanaan Penelitian

1. Keguaan Teoristis

   Kegunaan secara teoristis yaitu untuk pengembangan teori ataupun keilmuan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek

      Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam hal kinerja keuangan daerah.

   b. Bagi Penulis

      Untuk menambah kemampuan dalam melakukan sebuah peneltian serta untuk menabah wawasan dalam ilmu pengetahuan.

   c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai penelitian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan rasio keuangan. Perhitungan rasio ini berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini dibatasi hanya menggunakan 3 rasio keuangan yang terdiri dari rasio ketergantunagn keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah. Sealin itu, hanya menggunakan Laporan Realiasai Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek 2019-2023.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual
   a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

      Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan oleh pemerintah darah yang menyajikan data keuangan secara terstuktur atas transaksi yang dilakukan. [13]

   b. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

[13] Indra Bastian, "Sistem Akuntansi Sektor Publik", Edisi Kedua, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 7

Kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu tingkat kinerja atau pencapaian atas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai maksud, tujuan, visi, dan misi pemerintah daerah.[14]

c. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan analisis yang dilakukan unrtuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian yang diraih oleh pemerintah dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar.[15] Dalam melakukan analisis kinerja keungan pmerintah daerah, mengguanakan rasio keuangan sebagai alat untuk menialai kinerja keuangan pemerintah daerah.[16] Rasio keuanagn adalah membandingkan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan.[17] Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang akan digunakan antara lain :

1) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari eksternal atau luar serta menggambarkan seberapa besar tingkat partisiapsi atau kontribusi masyarakat dalam pembangunan masyarakat. [18]

2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

[14] Perturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang " Pengelolaan Keuangan Daerah"
[15] Irham Fahmi, "Analisis Laporan Keuangan", (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 2
[16] Rahayu, Rizkiza Aurin, dan Iskandar Sam, "Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019-2021", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 4, 2023, hal. 1546
[17] Kasmir, "Analisis Laporan Keuangan", (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 104
[18] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi sektor publik. *Jakarta: Salemba Empat.*

Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direnacakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil darah. [19]

3) Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio yang menggabarkan tingkat efisiensi atau tidaknya suatu kegiatan yang dikalukan pemerintahan daerah.[20]

2. Definsi Operasional

a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu catatan yang berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah yang disajikan secara terstuktur yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan.

b. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu gambaran yang berkaitan dengan tingkat pencapaian atas pengelolaan keuangan daerah.

c. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dearah

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis terhadap suatu tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam mengelola

[19] Nurul Wahyuni, Baso R, dan Sumarni S, "Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba", Tangible Journal, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 45 37

[20] Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, *8*(1), 33-48.

keuangan dengan baik dan benar. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan, dengan membandingkan angka-angka pada laporan keuangan. Rasio keuangan yang digunakan diantaranya:

1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

   Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membagi jumlah pendapatan tranfer dengan jumalah PAD.

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

   Rasio efektifitas pendapatan asli dihitung dengan cara membagi jumlah realisasi penerimaan PAD dengan jumlah target PAD (anggaran).

3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

   Rasio efisiensi PAD dihutung dengan cara membagi jumlah biaya pemerolehan PAD dengan jumlah realisasi penerimaan PAD.

H. Sistematika Pembahasan

1. **Bagain awal,** terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran.
2. **Bagian utama**, meliputi Bab 1, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, dan Bab VI dengan penjelasan sebagai berikut :

   Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar dan acuan mengapa penelitian ini dilakukan. Pendahuluan ini menguraikan

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi bahasan landasan teori yang relevan mengenai variabel penelitian yang diambil dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelotian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan- tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penlitian. Bab ini memuat paparan data dan temuan yang ada dilapangan yang berupa perhituangan data-data.

Bab V Pembahasan. Bab ini memuat deskripsi hasil penelitian dan menjabarkan analisis yang berisi tentang perhitungan data-data yang diperoleh dari penelitain hingga diketahui hasilnya, yang kemudian dialukan analisis terhadap hasil guna mendapatkan kesimpulan.

Bab VI Penutup. Bab penutup ini mencakup kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat, pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.